

ANALISIS STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

Dewantari Haurra Faricandy

Mahasiswa Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro,
Jl. Prof. SoedartoTembalang Semarang 50275Telp. 024 76486851 / 76486853 Fax. 024
76486852

Email : dewantari.hf@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat di Kecamatan Bonang sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan dengan jumlah 9.986 orang. Semua nelayan di Kecamatan Bonang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB). Nelayan di Kecamatan Bonang masih menggunakan alat tangkap tradisional dan menggunakan kapal kecil dengan kapasitas 1 sampai 4 orang untuk kegiatan penangkapan ikan. Hasil tangkapan perikanan laut baik di Kecamatan Bonang maupun di kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Demak hanya boleh dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hampir semua nelayan di Kecamatan Bonang tidak memiliki sumber pendapatan lain dan bergantung pada hasil dari tangkapan. Bantuan dana yang diberikan melalui beberapa program pemberdayaan yang dilaksanakan dinilai belum tepat. Selain itu kondisi nelayan yang tidak pasti dan tidak adanya agunan membuat mereka sulit mendapatkan pinjaman modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari hasil indepth interview dengan key persons yang kemudian disusun menjadi aspek dan alternatif strategi pemberdayaan nelayan. Selanjutnya untuk menentukan urutan prioritas dari aspek dan alternatif strategi pemberdayaan nelayan menurut key persons, digunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). Berdasarkan hasil wawancara dan indepth interview dengan key persons, dirumuskan lima aspek dan tiga belas alternatif untuk strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang. Urutan aspek strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang berdasarkan hasil dari analisis AHP yaitu : Aspek Ekonomi, Aspek Sosial, Aspek Teknologi, Aspek Lingkungan dan Aspek Kelembagaan. Sementara itu urutan lima prioritas alternatif strategi pemberdayaan nelayan di Kecamatan Bonang adalah : Bantuan langsung berupa alat, Bantuan langsung berupa dana, Pengembangan akses permodalan, Sosialisasi dan pelatihan usaha pengolahan sumberdaya perikanan, Meningkatkan sosialisasi pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan perikanan menuju pelestarian sumberdaya perikanan.

Kata kunci : strategi pemberdayaan masyarakat nelayan, Kecamatan Bonang, Analytical Hierarchy Process (AHP), perikanan tangkap.

1. PENDAHULUAN

Data menunjukkan bahwa secara keseluruhan, penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan di Kecamatan Bonang cukup banyak yaitu 9541 orang. Sedangkan mayoritas penduduk Kecamatan Bonang adalah sebagai petani. Kecamatan Bonang dengan jumlah rumah tangga miskin tertinggi juga merupakan kecamatan dengan jumlah nelayan terbanyak di Kabupaten Demak. Berdasarkan Demak Dalam Angka (2013). Hal ini mungkin saja

berkaitan, melihat kondisi masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang masih mengalami beberapa kendala. Beberapa kendala utama disektor perikanan dan kelautan atau di pesisir secara umum meliputi produktivitas, efisiensi usaha, keterbatasan sarana dan prasarana serta terbatasnya kredit dan infrastruktur kelautan dan perikanan.

Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui program-program intervensi pembangunan. Program-program tersebut kurang lebih bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan usaha nelayan kecil, dan peningkatan fungsi kelembagaan ekonomi nelayan sebagai lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan. Salah satu program yang telah dilaksanakan di Kabupaten Demak adalah Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT).

Program PUMP Perikanan Tangkap yang dilaksanakan pada tahun 2011 hingga 2013 ini diadakan di tiga kecamatan di Kabupaten Demak, yaitu di Kecamatan Sayung, Kecamatan Bonang, dan Kecamatan Wedung. Sasaran utama dari program PUMP Perikanan Tangkap adalah terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) di kalangan masyarakat nelayan. KUB ini nantinya akan menjadi wadah untuk mengembangkan tujuan dari program PUMP. Dalam pelaksanaan program ini, masing-masing KUB akan menerima bantuan modal usaha sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan Rencana Usaha Bersama masing-masing KUB.

Melalui kegiatan PUMP Perikanan Tangkap diharapkan berkembangnya usaha penangkapan ikan, berkembangnya kewirausahaan nelayan, dan menjadikan KUB sebagai lembaga ekonomi di pedesaan. Program ini dinilai cukup berhasil, berdasarkan tercapainya sebagian besar indikator keberhasilan seperti, tersalurkannya BLM dan dimanfaatkannya untuk kegiatan usaha produktif, serta terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan KUB melalui pendampingan dan pembinaan.

Masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang masih memiliki beberapa kesulitan dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan yang optimal, salah satunya yaitu kurangnya modal usaha. Masyarakat nelayan di Kabupaten Demak sulit mendapat pinjaman modal karena dinilai tidak memenuhi persyaratan administrasi seperti tidak memiliki surat kepemilikan hak atas tanah, surat kepemilikan kapal, dan lain sebagainya. Terhambatnya akses pemasaran juga terjadi dikarenakan tidak tersedianya alat penyimpanan sumberdaya ikan (*cool storage*), sehingga proses penjualan/pelelangan harus dilakukan saat itu juga dengan jangkauan yang tentu terbatas. Selain itu, peran lembaga seperti koperasi juga belum berjalan dengan

maksimal bahkan sempat vacuum. Salah satu upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan nelayan tersebut adalah melalui program Pembinaan Usaha Mina Pedesaan.

Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi dan karakteristik masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?
2. Apakah aspek dan alternatif prioritas strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengeksplorasi kondisi dan karakteristik masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Menganalisis aspek dan alternatif prioritas strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pemberdayaan

Menurut Korten (1992) pemberdayaan (empowerment) adalah peningkatan kemandirian masyarakat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal. Sedangkan menurut Pranarka dan Vidhyandika (1995:56) pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adli dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain sebagainya.

Selain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Robert Dahl (1983:50) mengatakan bahwa pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya. Sementara Hulme dan Turner (1990:214-215) berpendapat bahwa

pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga.

Strategi Pemberdayaan Nelayan

Menurut Nikijuluw (2002), ada lima pendekatan pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu: (1) penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga; (2) mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (self financing mechanism); (3) mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna; (4) mendekatkan masyarakat dengan pasar; serta (5) membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat. Kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat nelayan.

Departemen Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa, berdasarkan karakteristik masyarakat pesisir (nelayan) dan cakupan pemberdayaan, maka pemberdayaan nelayan patut dilakukan secara komprehensif. Pembangunan yang komprehensif, yakni pembangunan dengan memiliki ciri-ciri: (1) berbasis lokal (melibatkan sumberdaya lokal sehingga return to local resource dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Sumberdaya lokal yang patut digunakan adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, (2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan (menitikberatkan kesejahteraan masyarakat dan bukannya peningkatan produksi), (3) berbasis kemitraan (kemitraan yang mutualistis antara orang lokal atau orang miskin dengan orang yang lebih mampu, untuk membuka akses terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen yang lebih baik atau profesional, serta pergaulan bisnis yang lebih luas, (4) secara holistik atau multi aspek (pembangunan mencapai semua aspek, setiap sumberdaya lokal patut diketahui dan didayagunakan), dan (5) berkelanjutan, yakni keberlanjutan dari pembangunan itu sendiri, mencakup aspek ekonomi dan sosial (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2002).

3. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan

analisis pada dokumen yang bersumber dari buku, jurnal, laporan. Sedangkan wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden penelitian berdasarkan kuesioner yang telah dibuat.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statistik deskriptif, Indepth Interview, dan Analytical Hierarchy Process (AHP).

Indepth Interview

Indepth Interview merupakan proses menggali informasi secara mendalam mengenai topik penelitian, yaitu mengenai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Demak. Sesuai dengan tujuan penelitian, Indepth Interview dilakukan guna mengetahui strategi-strategi yang tepat dan perlu dilakukan pada program pemberdayaan selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Indepth Interview dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan beberapa ahli dalam bidang terkait (key persons).

Analytical Hierarchy Process (AHP)

Setelah diketahui strategi-strategi yang tepat berdasarkan hasil Indepth Interview, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) guna menentukan prioritas strategi kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan. Dalam prosesnya, AHP memasukkan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi serta logis yang bergantung pada imajinasi, pengalaman, dan pengetahuan.

Saaty (1993) mengatakan bahwa AHP dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks menjadi suatu hirarki. Yang dimaksud masalah kompleks adalah masalah yang memiliki berbagai kriteria (multikriteria), belum memiliki struktur yang jelas, tidak ada kepastian pendapat dari banyak pengambil keputusan, serta tidak memiliki data yang akurat. Sementara itu, hirarki merupakan representasi dari suatu permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel dimana level pertama adalah tujuan yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya hingga level terakhir yaitu alternatif. Dengan menyusun hirarki, suatu permasalahan yang kompleks diuraikan ke dalam kelompok-kelompok sehingga tampak lebih terstruktur dan sistematis.

4. HASIL DAN ANALISIS

Penduduk Kecamatan Bonang sebagian besar bekerja sebagai nelayan baik yang bergerak di perikanan tangkap atau perikanan budidaya. Sedangkan mata pencaharian

penduduk Kecamatan Bonang lainnya adalah petani, buruh tani, buruh bangunan, pengusaha, angkutan, dan PNS/ABRI. Jumlah nelayan di Kecamatan Bonang adalah 9.986 orang dengan jumlah terbanyak terdapat di desa Purworejo yaitu 3.154 kemudian diikuti oleh desa Morodemak dan desa Betahwalang dengan jumlah masing-masih 1.693 dan 1.431 orang nelayan. Jumlah nelayan paling sedikit terdapat di desa Wonosari yaitu sebanyak 9 orang. Dari 21 desa di Kecamatan Bonang ini, terdapat 3 desa yang tidak memiliki penduduk bermatapencarian sebagai nelayan yaitu desa Sumberejo, desa Sukodono, dan desa Jatimulyo.

Semua nelayan di Kecamatan Bonang tergabung dalam KUB (Kelompok Usaha Bersama). Setiap KUB biasanya terdiri dari satu desa, namun ada juga beberapa KUB yang terdiri dari dua dan/atau tiga desa dikarenakan jumlah nelayan di dalam satu desanya sedikit dan lokasi desa yang berdekatan. KUB dibentuk oleh nelayan setempat dengan arahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Demak yang merupakan salah satu syarat untuk mendapat bantuan dari Pemerintah. Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Demak akan mengajukan proposal permohonan bantuan untuk nelayan Kecamatan Bonang kepada Dinas Perikanan Provinsi. Bentuk bantuan yang diberikan pemerintah untuk bidang perikanan tangkap berupa peralatan navigasi untuk kegiatan nelayan ketika melaut seperti GPS, Fish Finder, tenaga surya (solar cell).

Jenis kapal yang digunakan nelayan di Kecamatan Bonang untuk kegiatan penangkapan masih tradisional. Setiap kapalnya mayoritas 1 mesin dan untuk kegiatan melaut biasanya diisi sebanyak 1 sampai 4 orang nelayan. Kapal nelayan untuk satu hari melaut biasanya memerlukan 30 liter solar, dengan berangkat pagi pulang sore hari (one day fishing), tapi ada juga yang melakukan kegiatan penangkapan sehari-hari di laut. Kapal-kapal yang dipakai nelayan sebagian besar merupakan kepemilikan sendiri. Berdasarkan wawancara dengan pak Nanang, alat tangkap yang digunakan masih sering berganti-ganti sehingga sulit untuk diinventarisir. Selain sulit untuk menghitung alat tangkap di Kecamatan Bonang, masih ada beberapa nelayan yang menggunakan alat bantu kompresor. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena selain membahayakan bagi ekosistem, hal ini juga membahayakan keselamatan nelayan sendiri.

Hasil produksi terbesar di Kecamatan Bonang untuk perikanan tangkap pada tahun 2016 unggul pada jenis ikan teri yaitu dengan jumlah produksi 798.040 kg dan harga rata-rata Rp 9.980,-. Selanjutnya ada ikan kembung, dan cumi-cumi dengan jumlah produksi masing-

masing 722.721 kg dan 273,878 kg dan harga rata-rata Rp 13.001,- dan Rp 10.252,-. Untuk hasil dari produksi perikanan tangkap di Kabupaten Demak semuanya dijual di TPI (Tempat pelelangan ikan) dan tidak melalui tengkulak ataupun langsung ke pasar. Hal tersebut telah tercantum dalam peraturan pemerintah dari Dinas Perikanan setempat.

Strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang diawali dengan penetapan kriteriaa dan alternatif yang disusun berdasarkan sintesa wawancara dengan key persons yang berkompeten mengenai permasalahan yang selama ini terjadi dan alternatif langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selengkapnya aspek dan alternatif strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

ASPEK	ALTERNATIF	
K1 Aspek Ekonomi	A1	Bantuan modal berupa dana
	A2	Bantuan langsung berupa alat
	A3	Pengembangan akses permodalan
K2 Aspek Teknologi	A4	<i>Pengadaan Cool Storage</i>
	A5	Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan
	A6	Pengadaan program informasi untuk nelayan seperti ramalan cuaca dan fish finder
K3 Aspek Kelembagaan	A7	Pengaktifan PKK untuk mewadahi kegiatan para istri nelayan
	A8	Pengaktifan koperasi yang menaungi kegiatan para nelayan.
K4 Aspek Sosial	A9	Pengarahan dan penyuluhan untuk beralih ke budidaya (ikan air tawar)
	A10	Meningkatkan sosialisasi pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan perikanan menuju pelestarian sumberdaya perikanan
	A11	Sosialisasi dan Pelatihan usaha pengolahan sumberdaya perikanan
K5 Aspek Lingkungan	A12	Mengadakan program pengerukan secara rutin
	A13	Pembuatan pemecah gelombang

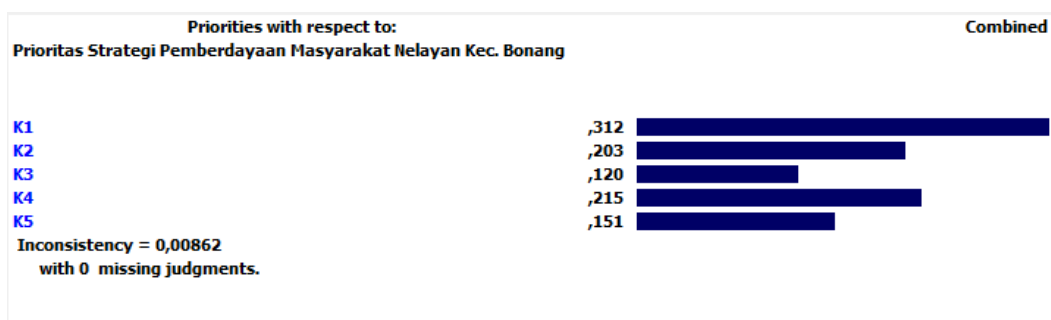
Tabel 4.1

Aspek dan Alternatif Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Bonang
Sumber : Data diolah, 2017

Setelah ditetapkan aspek dan alternatif strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, key persons melakukan penilaian terhadap setiap

aspek dan alternatif dilakukan analisis dengan menggunakan software Expert Choice 11 untuk mengetahui aspek dan alternatif prioritas.

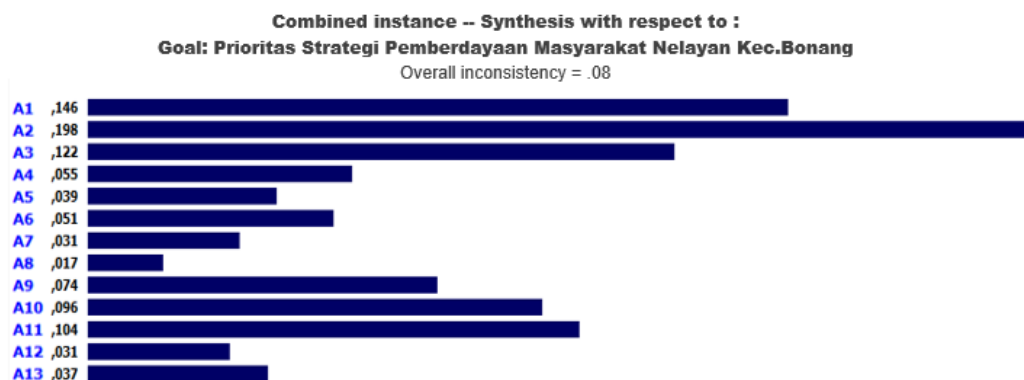
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai inconsistency ratio sebesar 0,008 ($CR \leq 0,1$) yang berarti pairwise comparison sudah konsistendan hasil analisis dapat diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek ekonomi merupakan aspek yang dianggap paling penting dalam strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan nilai bobot sebesar 0,312. Pemilihan aspek ekonomi berkaitan dengan permasalahan utama masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yakni kurangnya bantuan baik berupa dana maupun bantuan alat dan juga susahny mendapat bantuan berupa pinjaman modal.



Gambar 4.1

Prioritas Aspek Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Bonang
Sumber : Output AHP, 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis, key persons memilih alternatif bantuan langsung berupa alat/barang sebagai prioritas utama. Selengkapny prioritas alternatif strategi pemberdayaan masyarakat nelayan dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini.

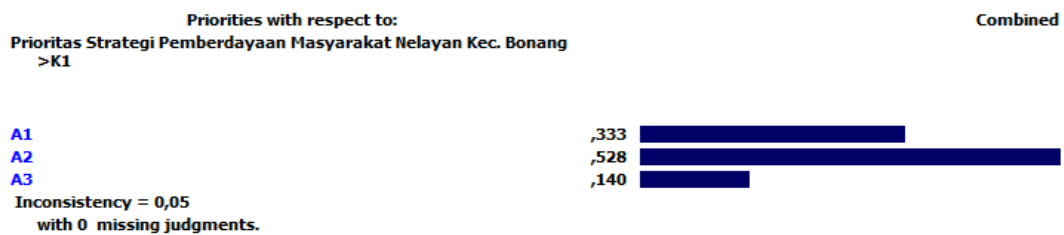


Gambar 4.2

Prioritas Alternatif Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Bonang
Sumber : Output AHP, 2017

Nilai inconsistency ratio sebesar 0,08 ($CR \leq 0,1$) yang berarti pairwise comparison sudah konsisten dan hasil analisis dapat diterima. Urutan lima prioritas alternatif strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak menurut key persons adalah; 1) Bantuan langsung berupa alat, 2) Bantuan langsung berupa dana, 3) Pengembangan akses permodalan, 4) Sosialisasi dan Pelatihan usaha pengolahan sumberdaya perikanan, 5) Meningkatkan sosialisasi pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan perikanan menuju pelestarian sumberdaya perikanan.

Aspek Ekonomi



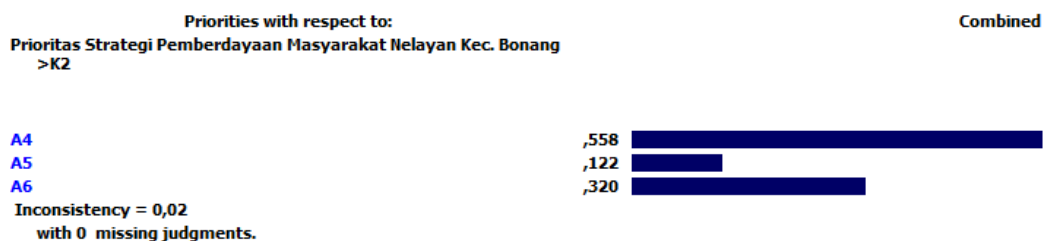
Gambar 4.3

Prioritas Alternatif Aspek Ekonomi

Sumber : Output AHP, 2017

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai inconsistency ratio sebesar 0,05 yang berarti pairwise comparison sudah konsisten dan hasil analisis dapat diterima. Urutan prioritas alternatif aspek ekonomi adalah: 1) bantuan berupa alat (A2) dengan nilai bobot 0,528; 2) bantuan berupa dana (A1) dengan nilai bobot 0,333; dan 3) pengembangan akses permodalan (A3) dengan nilai bobot 0,14.

Aspek Teknologi



Gambar 4.4

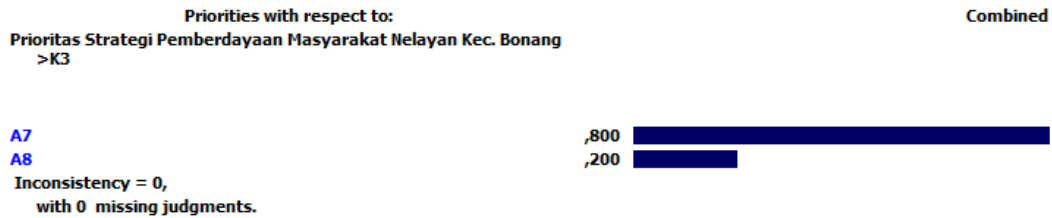
Prioritas Alternatif Aspek Teknologi

Sumber : Output AHP, 2017

Hasil analisis data diperoleh nilai inconsistency ratio sebesar 0,02 yang berarti pairwise comparison sudah konsisten dan hasil analisis dapat diterima. Urutan prioritas alternatif aspek teknologi adalah: 1) Pengadaan Cool Storage (A4) dengan nilai bobot 0,55; 2) Pengadaan program informasi untuk nelayan seperti ramalan cuaca, dan fish finder

(A6) dengan nilai bobot 0,32; dan 3) Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan (A5) dengan nilai bobot 0,12.

Aspek Kelembagaan



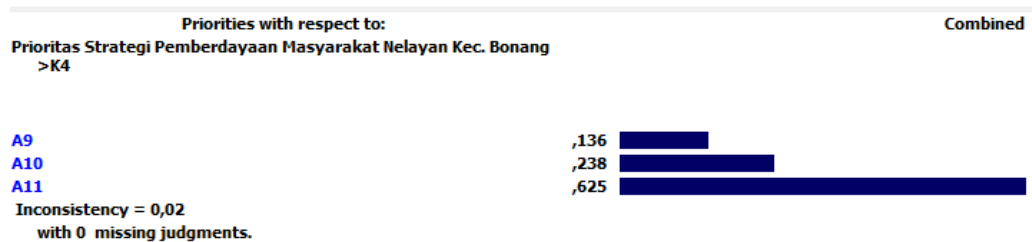
Gambar 4.5

Prioritas Alternatif Aspek Kelembagaan

Sumber : Output AHP, 2017

Hasil analisis data diperoleh nilai inconsistency ratio sebesar 0,05 yang berarti pairwise comparison sudah konsisten dan hasil analisis dapat diterima. Urutan prioritas alternatif aspek kelembagaan adalah: 1) Pengaktifan PKK untuk memfasilitasi kegiatan para istri nelayan (A7) dengan nilai bobot 0,8; 2) pengaktifan Koperasi yang menaungi para nelayan (A8) dengan nilai bobot 0,2.

Aspek Sosial



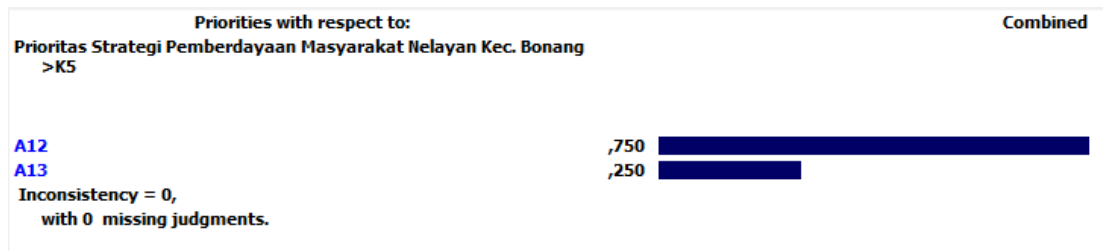
Gambar 4.6

Prioritas Alternatif Aspek Sosial

Sumber : Output AHP, 2017

Hasil analisis data diperoleh nilai inconsistency ratio sebesar 0,02 yang berarti pairwise comparison sudah konsisten dan hasil analisis dapat diterima. Urutan prioritas alternatif aspek kelembagaan adalah: 1) Sosialisasi dan Pelatihan usaha pengolahan sumberdaya perikanan (A11) dengan nilai bobot 0,62; 2) Meningkatkan sosialisasi pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan perikanan menuju pelestarian sumberdaya perikanan(A10) dengan nilai bobot 0,23; dan 3) Pengarahan dan penyuluhan untuk beralih ke budidaya (ikan air tawar) (A9) dengan nilai bobot 0,12.

Aspek Lingkungan



Gambar 4.7

Prioritas Alternatif Aspek Lingkungan

Sumber : Output AHP, 2017

Hasil analisis data diperoleh nilai inconsistency ratio sebesar 0,0 yang berarti pairwise comparison sudah konsisten dan hasil analisis dapat diterima. Urutan prioritas alternatif aspek kelembagaan adalah: 1) Mengadakan program pengerukan secara rutin (A12) dengan nilai bobot 0,75; 2) Pembuatan pemecah gelombang(A13) dengan nilai bobot 0,25.

5. KESIMPULAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil pembahasan atas permasalahan dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu :

1. Masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan dengan jumlah 9.986 orang. Semua nelayan di Kecamatan Bonang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan nelayan di Kecamatan Bonang masih menggunakan alat tangkap tradisional dan menggunakan kapal kecil dengan kapasitas 1 sampai 4 orang untuk kegiatan penangkapan ikan. Para nelayan di Kecamatan Bonang hanya boleh menjual hasil tangkapannya ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
2. Berdasarkan hasil wawancara dan indepth interview dengan key persons, dirumuskan lima aspek dan tiga belas alternatif untuk strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang. Adapun urutan aspek strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang berdasarkan hasil dari analisis AHP yaitu : Aspek Ekonomi, Aspek Sosial, Aspek Teknologi, Aspek Lingkungan dan Aspek Kelembagaan.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data-data perikanan tangkap di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang disajikan masih terbatas.
2. Analisis yang bersifat deskriptif masih kurang detail dan banyak kekurangan dikarenakan data yang didapat dari hasil indepth interview kepada key persons kurang mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- AT, C. 2001. *Sustainable fishery systems*. London: Blackwell Science Ltd.
- BPS. 2012. *Demak dalam Angka 2012*. Kabupaten Demak.
- BPS. 2013. *Demak dalam Angka 2013*. Kabupaten Demak.
- BPS. 2014. *Demak dalam Angka 2014*. Kabupaten.
- BPS. 2015. *Demak dalam Angka 2015*. Kabupaten Demak.
- BPS. 2016. *Demak dalam Angka 2016*. Kabupaten Demak.
- BPS. 2017. *Demak dalam Angka 2017*. Kabupaten Demak.
- Cahyadinata, I. 2011. *Rumusan dan Penentuan Prioritas Strategi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kota Bengkulu*. Bengkulu.
- Dahuri R, J. S. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dinas Kelautan dan Perikanan. 2015. *Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2015*. Kabupaten Demak.
- Dinas Kelautan dan Perikanan. 2016. *Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2016*. Kabupaten Demak.
- Dinas Kelautan dan Perikanan. 2017. *Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2017*. Kabupaten Demak.
- Hikmat, A. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat Bandung*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kusnadi. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara.
- Kusnadi, S. S. 2007. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara.
- Mawuntu, V. C. 2015. *Profil Perikanan Tangkap dan Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap di Karimunjawa, Jawa Tengah*. Skripsi, Progeam sarjana Universitas Diponegoro.
- Nasution A, B. 2007. *Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Konsep dan Indikator Pemberdayaan*. Jakarta: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
- Nikijuluw, P. 2001. *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. Makalah pada Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Proyek Pesisir*. Bogor: Jurnal Pusat Kajian Sumberdaya pesisir dan Lautan PKSPL.

- Saaty, T. L. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Sartika, I. 2012. *Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan*. Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sipahelut, M. 2010. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Tesis, Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Siswanto, B. 2008. *Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan*. Malang: Laksbang Mediatama.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D Ed ke-2*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Alfabeta.